

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

5.1.1. Geografis

Kabupaten Rokan Hulu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 dan direvisi dengan UU No. 11 Tahun 2003 dengan ibu kota Pasir Pengarayan. Pada tahun 2008 ini terdapat 16 kecamatan, 6 kelurahan dan 142 desa dengan kepadatan penduduk 50 jiwa/km². Empat kecamatan diantaranya yang tergolong tertinggal adalah Rambah Samo, Bangun Purba, Tambusai Utara, dan Kepenuhan.

Kabupaten Rokan Hulu mempunyai luas wilayah $\pm 7.449,85$ km² (744.985 hektar) atau $\pm 7,88\%$ dari luas wilayah Propinsi Riau (94.561,60 km²). Batas wilayah adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Propinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu terletak pada ketinggian berkisar antara 10-164 meter dari permukaan laut. Daerah yang tertinggi adalah Rambah Samo dan yang terendah adalah Bonai Darussalam. Daerah ini terdapat dua sungai besar dan beberapa sungai kecil, yaitu Sungai Rokan Kanan dan Rokan Kiri yang panjangnya ± 100 km dengan kedalaman rata-rata 6 m dan lebar 92 m. Aliran sungai ini bagian hulunya berada di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat yang mengalir melalui Kecamatan Rokan IV Koto, Tandun, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai, dan Kepenuhan. Sungai ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, dan budidaya ikan.

Wilayah kabupaten ini tergolong daerah bertipe iklim tropis dengan curah hujan berkisar 41-319 mm per tahun dan jumlah hari hujan 7-26 hari

per tahun. Temperatur maksimum rata-rata 31-32 °C (BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2007).

5.1.2. Demografi

Penyebaran penduduk Kabupaten Rokan Hulu relatif tidak merata. Pada tahun 2006, berpenduduk sebanyak 372.812 jiwa, dengan kepadatan penduduk 50 jiwa/km², terdiri atas 194.256 jiwa (52,10%) laki-laki dan 178.556 jiwa (47,90%) perempuan, sehingga mempunyai *sex ratio* 109, artinya setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 109 jiwa penduduk laki-laki. Berdasarkan data dari BPS (2005), dari 340.395 jiwa penduduk terdapat 99.556 jumlah penduduk miskin (29,24%) atau terdapat 28.230 rumah tangga miskin (35,38%).

5.1.3. Penggunaan Lahan

Kondisi daratan terdiri atas beragam jenis penggunaan lahan untuk pertanian (Tabel 5.1).

Tabel 5.1. Penggunaan Lahan di Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1.	Tanah Sawah	3.994
2.	Pekarangan	30.130
3.	Tegal/Kebun	88.444
4.	Ladang/Huma	18.852
5.	Padang Rumput	230
6.	Rawa Tidak Ditanami	14.716
7.	Kolam	343
8.	Sementara Tidak Diusahakan	19.536
9.	Hutan Rakyat	43.335
10.	Hutan Negara	138.673
11.	Perkebunan	325.973
12.	Tanah lainnya	76.249

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu (2007)

Sebagian besar penggunaan lahan yang ada di daerah ini merupakan lahan kering yang mencapai 756.481 hektar (99,47%). Lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan seluas 325.973 hektar. Selain itu, terdapat lahan rawa yang tidak dimanfaatkan yang merupakan lahan tidur seluas 14.716 hektar. Lahan ini merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan

untuk dijadikan lahan produktif dan sebagai peluang untuk memperluas areal pertanian.

Dengan demikian, usahatani perkebunan merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan sumber pendapatan daerah yang penting bagi perekonomian Kabupaten Rokan Hulu. Luas pengembangan areal perkebunan tahun 2007 di Kabupaten Rokan Hulu tercatat 333.040,16 ha, dengan sebaran komoditi utama untuk setiap kecamatan seperti yang ditampilkan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Sebaran Komoditi Perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Luas Areal Komoditi Perkebunan (Ha)				
		Karet	Kelapa Sawit	Gambir	Kelapa Dalam	Kakao
1.	Rokan IV Koto	10.385	11.998	1.010	72	16
2.	Tandun	725	15.418		34	21
3.	Kabun	2.355	31.907		7	
4.	Ujung Batu	425	10.506		32	343
5.	Rambah Samo	6.369	23.439		127	1
6.	Rambah	5.560	1.898		142	9
7.	Rambah Hilir	10.608	5.452		131	17
8.	Bangun Purba	2.301	6.551		14	1
9.	Tambusai	2.700	43.473		191	13
10.	Tambusai Utara	10.654	42.344		284	-
11.	Kepenuhan	2.474	21.408		78	29
12.	Kunto Darussalam	114	56.530		175	
13.	Pagaran Tapah D	127	4.348		14	
14.	Bonai Darussalam	30,50	333		36	1
Jumlah		53.830	275.609	1.010	1.340	452

Sumber: Statistik Perkebunan Provinsi Riau, 2007

Komoditi kelapa sawit dan karet merupakan komoditi yang paling diminati masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, karena mendominasi 82,75% dari luasan perkebunan, diikuti oleh karet (16,16 %), kelapa dalam (0,40%), gambir (0,30%), dan kakao (0,14%). Areal tanaman kelapa sawit terluas berada di Kecamatan Kunto Darussalam, diikuti dua kecamatan lain yaitu Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara. Areal Karet terluas dijumpai di Kecamatan Tambusai Utara, diikuti Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Rokan IV Koto.

Pembangunan sektor perkebunan di daerah ini mengikuti empat pola pembangunan, yaitu: Pola Swadaya Murni, Pola UPP (Unit Pelayanan Pengembangan), Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA/PIR), dan Perkebunan Besar Swasta/Negara (PBS/PBN). Sebaran luas areal masing-masing pola ditampilkan pada Tabel 5.3. Luas areal perkebunan dengan pola swadaya mendominasi peruntukan areal perkebunan yaitu meliputi 49,69%. Setelah itu pola pengembangan PBS, PBN dan PIR dengan luasan 37,89%, 6,65% dan 5,77% dari total areal perkebunan.

Tabel 5.3. Sebaran Komoditi Perkebunan Berdasar Pola Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu

No.	Komoditi	Luas Areal Berdasar Pola Pembangunan Perkebunan (ha)			
		Swadaya	PIR	PBS	PBN
1.	Kelapa Sawit	108.644	19.164	125.712	22.089
2.	Karet	53.630	-	200	-
3.	Kelapa Dalam	1.341	-	-	-
4.	Gambir	1.010	-	-	-
5.	Kakao	452	-	-	-
Jumlah		165.077	19.164	125.912	22.089

Sumber: Statistik Perkebunan Provinsi Riau, 2007

Pola swadaya yang diterapkan pada dasarnya terdiri atas dua macam, yaitu pola swadaya murni dan swadaya berbantuan. Pola swadaya murni dilaksanakan oleh petani tanpa bantuan pemerintah pekebun. Sedangkan pola swadaya berbantuan dilaksanakan oleh petani yang diberi bantuan berupa sarana dan sebahagian biaya pengolahan lahan atau biaya pemeliharaan.

Pola swadaya mempunyai kontribusi terbesar bagi pengembangan perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu. Namun jika dikaitkan dengan tingkat produksi, produksi yang dihasilkan masyarakat dengan pola swadaya lebih rendah dibandingkan dengan Perkebunan Besar Swasta. Pada lima komoditi terbesar yang diambil terlihat pola PIR hanya menyumbang 42,57% dibawah lebih sedikit dibandingkan pola PBS yaitu 48,13% dan Perkebunan Besar Negara 9,3%. Hal ini wajar bila dilihat dari pola swadaya murni banyak masyarakat yang tidak melakukan usahatani dengan baik seperti

jarangnya memupuk tanamannya sehingga produksi menjadi menurun (Tabel 5.4).

Tabel 5.4. Sebaran Produksi Komoditi Perkebunan Berdasar Pola Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007.

No.	Komoditi	Produksi Berdasar Pola Pembangunan Perkebunan (ton)		
		PIR	PBS	PBN
1.	Kelapa Sawit	349.207	467.785	90.432
2.	Karet	63.030	358	-
3.	Kelapa Dalam	791	-	-
4.	Gambir	410	-	-
5.	Kakao	231	-	-
Jumlah		413.670	468.143	90.432

Sumber: Statistik Perkebunan Provinsi Riau, 2007

Sampai saat ini pengolahan karet (pabrik karet) belum ada di Kabupaten Rokan Hulu sehingga hasil produksi karet dipasarkan ke Kabupaten Kampar, Pekanbaru dan ke Propinsi Sumatera Utara. Ketiadaan pabrik karet ini menyebabkan harga karet tertekan di tingkat petani.

5.2. Penyebaran Desa Tertinggal

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu akan mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata karena pertumbuhan ekonomi ini bisa saja hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, terutama di perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan mendapat porsi yang kecil dan tertinggal. Berdasarkan data yang ada, di daerah Riau terjadi kesenjangan (disparitas) terutama antar daerah dan sektor serta antar golongan masyarakat. Kesenjangan antar kabupaten/kota paling menyolok pada tahun 2007 adalah antara daerah Kabupaten Bengkalis dan Siak yang tumbuh lebih dari 8 % dengan daerah yang lain, misalnya daerah Kabupaten Rokan Hulu yang tumbuh hanya sekitar 6%. Demikian juga kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antar golongan dalam masyarakat. Kesenjangan ini cukup berbahaya karena menyimpan potensi konflik kerusuhan dan kecemburuan sosial yang pada gilirannya membahayakan kestabilan nasional. Akibat lanjut dari kesenjangan ini adalah munculnya

daerah-daerah tertinggal dan miskin yang terbelakang dalam pembangunan terutama daerah-daerah di pedesaan.

Kesenjangan di daerah tertinggal ini semakin diperburuk karena adanya kesenjangan dalam pembangunan antar sektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi pedesaan) dan non-pertanian (ekonomi perkotaan). Adanya daerah-daerah tertinggal ini tidak hanya membawa kemiskinan bagi masyarakat tetapi dalam jangka panjang kesenjangan yang bersifat akumulatif ini akan menyebabkan daerah yang tertinggal akan semakin jauh tertinggal sementara yang maju akan tetap maju dengan percepatan yang semakin sulit dikejar. Hal ini karena adanya perbedaan sumberdaya manusia, pertumbuhan awal dan hasil pembangunan berjalan yang secara akumulatif mendorong pertumbuhan selanjutnya sehingga akselerasi pembangunan di kedua daerah berbeda. Kesenjangan ini hanya dapat diatasi bila ada intervensi pemerintah dengan cara mengkontrol daerah tertinggal sehingga basis perekonomian menjadi terangkat untuk memacu pertumbuhan dan bersaing secara lebih fair dengan daerah lain.

Berdasarkan data dari Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, pada tahun 2007 di daerah Riau terdapat 471 desa tertinggal. Salah satu kabupaten yang banyak terdapat desa tertinggal adalah Kabupaten Rokan Hulu, dimana pada tahun 2007 terdapat 95 desa/kelurahan dan 39 desa diantaranya adalah desa tertinggal. Banyaknya desa tertinggal dan keluarga prasejahtera di daerah ini merupakan indikasi bahwa pembangunan ekonomi selama ini belum menyentuh rakyat lapisan bawah sehingga dengan adanya krisis menyebabkan daerah-daerah pedesaan yang terpencil menjadi rentan sehingga terpuruk menjadi daerah miskin. Hal ini disebabkan selain oleh karena kebijaksanaan yang salah dan distortif pada masa lalu juga karena kondisi wilayah Rokan Hulu yang luas dan sangat bervariasi.

5.3. Karakteristik Ekonomi Masyarakat

Pembangunan daerah harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan selaras dengan potensi sumberdaya alam yang tersedia, sehingga peran penting

perkebunan sebagai penggerak perekonomian daerah, mendukung pengembangan wilayah, penyerap tenaga kerja, pendorong pengembangan industri hilir, penyedia devisa negara serta peran pentingnya mendukung kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup akan semakin meningkat. Namun dalam kenyataannya sebagian besar petani yang terlibat belum berada pada posisi yang menguntungkan disebabkan faktor internal dan faktor eksternal diluar petani. Sebagai gambaran umum dari karakteristik masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha bidang perkebunan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

5.3.1 Kepemilikan Lahan

Tanah merupakan sumberdaya strategis dan menjadi salah satu faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan pertanian. Tanah memiliki nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi dan politik serta nilai sakral bagi pemiliknya terutama masyarakat pedesaan. Selain itu ketersediaan tanah tidak saja ditentukan oleh faktor kesesuaiannya namun juga ditentukan oleh aspek kelembagaan yakni penguasaan tanah oleh orang atau badan hukum. Oleh karena itu penguasaan tanah akan senantiasa menjadi faktor penentu kesejahteraan petani.

Program SRDP yang sudah berjalan sejak tahun 1980 di Rokan Hulu sampai tahun 1995 ternyata dari sisi penguasaan lahan telah terjadi perubahan status penguasaan. Luas pemilikan tetap dan luas penggarapan diantara petani sudah tidak sama lagi demikian pula status penguasaan kebun sudah beragam. Secara umum bertambah luasnya kebun milik petani terjadi karena mereka membeli kebun petani lain dan sebagiannya lagi membangun kebunnya sendiri namun jumlahnya relatif kecil. Luas kepemilikan lahan rata-rata petani karet di Rokan Hulu 1,38 ha dengan kisaran 1-4 ha, mayoritas merupakan petani dengan kepemilikan lahan dibawah 2 ha sebesar 66,67% di Rokan Hulu. Petani yang memiliki lahan > 2 ha umumnya petani yang membeli lahan dari petani peserta program SRDP lainnya.

Rata-rata kepemilikan lahan kebun kelapa sawit petani swadaya 1,13 ha berkisar 1-9 ha, mencakup tanaman yang menghasilkan dan tanaman

belum menghasilkan. Mayoritas petani kelapa sawit memiliki lahan di atas 2 ha (75%). Terdapat 83,33% petani yang melakukan penyadapan sendiri dan sisanya petani yang melakukan penyadapan dengan sistem bagi hasil masing-masing menerima 50% dari pendapatan yang diterima.

Bila dilihat dari ketersediaan lahan yang bisa dikembangkan untuk pengembangan kebun baru sangat terbatas dan letaknya terpencar. Oleh karena itu petani sudah menjadi sasaran program revitalisasi dengan sendirinya menjadi sasaran berbagai program pengembangan perkebunan.

Journal of Agricultural Science and Technology, Vol. 1, No. 1, 2019, pp. 28-33

5.3.2 Teknologi di Pedesaan

Dalam upaya peningkatan produktifitas perkebunan karet diperlukan suatu sistem pengelolaan perkebunan karet secara terpadu dengan menggunakan teknologi yang dapat meningkatkan produksi karet petani, menjamin kelangsungan hidup petani serta memelihara keanekaragaman hayati. Produktifitas karet masyarakat yang berasal dari program SRDP rata-rata 3.000 kg ojol/ha pertahun jauh melebihi produktifitas karet tradisional rata-rata 2.000 kg ojol/ha/th pertahun yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan petani program SRDP (70,83%).

Produktivitas karet petani tradisional yang rendah di bawah 2.000 kg ojol/ha pertahun disebabkan areal kebun karet yang sudah tua dan rusak dengan bibit yang belum terjamin kualitasnya. Disamping itu sebagian besar kebun karet tradisional cenderung menggunakan teknologi yang sederhana dengan populasi tanaman per hektar relatif cukup padat, kurangnya pemeliharaan, tidak adanya pemupukan, intensitas penyadapan yang tinggi (5 hari sadap perminggu) dan kondisi kebunnya yang mirip dengan hutan.

Kelangkaan dan kesulitan mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan petani sering menjadi kendala dalam peningkatan produktifitas kebun karena pendapatan yang mereka terima tidak sebanding dengan biaya pemupukan yang semestinya dilakukan tiga kali dalam setahun dengan dosis tiga sak dengan harga Rp 450.000/karung. Mayoritas petani tidak melakukan pemupukan dan hanya 5% petani yang memiliki lahan luas yang melakukan pemupukan.

5.3.3 Kelembagaan Ekonomi Masyarakat

Organisasi formal yang ada di Kabupaten Rokan Hulu diantaranya adalah Koperasi (KUD) dengan jumlah 58 KUD yang tersebar pada 14 kecamatan, 2 kecamatan diantaranya belum punya KUD (Pagaran Tapah dan Bonai Darussalam yang merupakan kecamatan pemekaran), menunjukkan masih terbatasnya lembaga keuangan formal yang dapat memfasilitasi dan mempermudah akses petani ke lembaga keuangan. Kelembagaan informal non KUD berjumlah sebanyak 119 buah. Pola pengembangan kelembagaan yang bersifat informal (majelis pengajian, lembaga adat, kelompok tani, arisan, kelompok nelayan) yang dibentuk oleh masyarakat mencerminkan motif ekonomi yang merupakan perpaduan dari semua kebutuhan masyarakat baik arisan, kelompok tani, paguyuban dan sebagainya yang dapat berperan dalam pembangunan sosial ekonomi suatu komoditas. Kenyataan menunjukkan keberadaan lembaga keuangan informal relatif cukup banyak membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan tuntutan masyarakat akan pembentukan kelembagaan tersebut.

Kelembagaan formal KUD hampir terdapat disemua kecamatan meskipun dari sisi jumlah masih terbatas untuk tiap-tiap desa. Terlepas dari masalah internal yang menyertainya masih sedikit KUD yang menjalankan peran sesuai fungsinya. Salah satu desa yang sudah menerima program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah Desa Babussalam dan disamping itu terdapat koperasi (Koperasi Mekar Jaya) yang beranggotakan petani karet dan cukup berperan dalam membantu anggotanya pada kegiatan pemasaran. Namun demikian koperasi ini belum berbadan hukum tapi sudah mampu memfasilitasi anggota untuk mendapatkan pinjaman modal dalam pembelian pupuk maupun keperluan lainnya dari dana simpanan anggota.

Agar perekonomian masyarakat bisa berkembang perlu dilakukan upaya membuka akses terutama bagi golongan masyarakat yang kekurangan modal misalnya bantuan kredit sehingga petani memiliki modal untuk membiayai usahataniya dan akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Namun penyaluran dana kredit diperdesaan tidak dengan



sendirinya memperbaiki akses petani miskin terhadap kredit karena kenyataannya kredit itu hanya dapat diakses oleh sebagian kecil petani yang tergolong mapan secara ekonomi. Permasalahan jaminan formal bagi kredit tersebut yang umumnya dalam bentuk sertifikat tanah masih menjadi kendala.

Produktivitas karet sangat tergantung kepada kondisi alam. Jumlah hari hujan pertahun berbanding terbalik dengan perolehan hasil. Panen dan harga yang tidak menentu menyebabkan petani sangat sulit untuk mengatur keuangan rumah tangga. Untuk menyikapi hal tersebut seringkali petani terjerat kepada sistem ijon. Petani sangat sulit lepas dari sistem ini, karena hasil karet adalah sumber pendapatan utama.

Keterlibatan petani dalam proses produksi dan lembaga pemasaran dilatarbelakangi oleh motif ekonomi untuk meningkatkan produksi dan posisi tawar dalam pemasaran melalui pengorganisasian keseluruhan hasil produksi. Namun kondisi lapangan menunjukkan sebagian besar petani masih melakukan kegiatan pemasaran secara perorangan ke pembeli meskipun mereka tergabung dalam sebuah lembaga ekonomi petani tapi belum memiliki posisi tawar. Hal ini dapat dilihat pada petani yang sudah bergabung dalam koperasi namun fakta menunjukkan bahwa pedagang atau toke tetap memiliki kekuatan yang lebih kuat dalam transaksi penentuan harga jual pada petani.

Desa Babussalam memiliki koperasi (Koperasi Mekar Jaya) yang beranggotakan petani karet dan cukup berperan dalam membantu anggotanya pada kegiatan pemasaran. Jumlah petani yang telah memanfaatkan koperasi ini untuk pemasaran sebanyak 80% dari jumlah petani karet dan sisanya menjual ke pedagang pengumpul karena terkait masalah hutang piutang yang sudah terjalin cukup lama. Besarnya pinjaman maksimum Rp 2 juta dengan lama pinjaman 10 bulan dan bunga pinjaman 1% perbulan. Koperasi Mekar Jaya sudah mampu memfasilitasi anggota kelompok dalam kegiatan pemasaran melalui proses lelang yang berlangsung sekali dalam 2 minggu dengan harga jual yang lebih tinggi (berkisar Rp 7.800-8.000/kg) dibandingkan dengan petani yang menjual ke pedagang pengumpul (Rp 6.000-7.000/kg). Di daerah ini sistem lelang ini telah mampu

meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitas melalui wadah koperasi karena posisi tawar petani terhadap harga menjadi lebih kuat sehingga harga karet menjadi lebih tinggi dari harga pasar yang dijual kepada pedagang pengumpul. Perbedaan harga yang dijual secara kolektif lebih tinggi Rp 1.000-1.500/kg nya dibandingkan menjual secara individu.

5.3.4 Kelembagaan Desa

Pemerintah harus menggalakkan kembali pembinaan kepada petani dan kelembagaan sebagai institusi yang mampu mengakumulasi modal sehingga dapat menunjang kegiatan perekonomian dan peremajaan kebun. Belum adanya kelembagaan struktural yang membina petani untuk meningkatkan produktifitas tanaman, penanganan pasca panen dan menyisihkan sebagian penghasilan untuk peremajaan yang memadai membuat usaha perkebunan rakyat yang berkelanjutan terlihat kabur.

Sampai saat ini kecenderungan petani karet masih mempertahankan kebun karet program SRDP yang sudah tua dengan produktifitas yang rendah sebagai sumber penghasilan mereka tanpa adanya usaha peremajaan karena menyangkut kebutuhan biaya peremajaan yang besar namun disisi lain petani juga belum memenuhi kewajibannya membayar kredit dari program SRDP. Padahal peremajaan tanaman mutlak dilakukan apabila petani ingin mempertahankan dan meningkatkan produktifitas. Petani cenderung belum melakukan kegiatan replanting karena disamping biaya pembangunan kebun cukup tinggi dan belum semua petani tersentuh program revitalisasi juga disebabkan karena petani menganggap produksi kebun mereka masih tinggi (rata-rata 8 kg ojol/hari) dan mereka baru akan melakukan replanting bila produksi karet 5 kg ojol /hari.

Kementerian PDT melalui program P2KPDT saat ini telah memulai program Revitalisasi untuk kebun kelapa sawit melalui pemberian kredit kepada petani untuk pembangunan kebun sebesar Rp 28 juta/ha. Program revitalisasi ini mensyaratkan petani harus tergabung dalam wadah koperasi. Namun permasalahan yang dikeluhkan petani dalam program revitalisasi ini adalah tidak adanya pendamping.

Hampir setiap kebun kelapa sawit swadaya masyarakat mengalami masalah klasik yaitu tingkat produktifitas yang rendah maupun tidak adanya jaminan pabrik, pengolahan yang secara khusus menjamin hasil produksi kebun swadaya masyarakat dengan produktifitas 7 ton/ha/th. Seperti kita ketahui dalam rantai sistem agribisnis nilai tambah terbesar terdapat pada tahap pemasaran dan tahap pengolahan yang selama ini dikuasai oleh perusahaan pemilik pabrik. Dilihat dari produktifitas rakyat yang rendah disebabkan oleh letak lahan yang terpisah dan cukup jauh mengakibatkan tidak tercapainya skala ekonomi.

5.3.5 Pendapatan Masyarakat dan Perkembangan Harga Komoditas

Selanjutnya agar masyarakat dapat lebih mampu melangsungkan kegiatan perekonomian pertanian secara lebih mandiri maka praktek monopoli, distribusi pemasaran sejogyanya dihapuskan. Kondisi ini jelas merugikan petani yang tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan harga jual produknya secara layak sesuai dengan mekanisme pasar.

Kendala yang dihadapi petani dalam mengembangkan komoditas perkebunan pada sisi produksi adalah terkendala rendahnya harga ditingkat petani sehingga intensifikasi usahatani (pemupukan dan pemeliharaan sangat tergantung pada harga yang diterima oleh petani) sementara itu dalam sisi pascapanen terkendala oleh pemasaran hasil olahannya. Harga karet ditingkat petani berkisar antara Rp 6.000 – Rp 8.000/kg dengan rata-rata Rp 7.415/kg. Perbedaan harga tergantung kepada perbedaan tempat penjualan dan informasi yang dimiliki petani mengenai perkembangan harga karet. Petani yang menjual karet ke pedagang pengumpul berjumlah 57,14%, menjual ke pasar 23,82% dan sisanya melalui koperasi dengan sistem lelang sebesar 19,04%.

Faktor lain penyebab rendahnya harga yang diterima petani karena sisi hubungan sosial antara petani dengan pihak lain yang ada di tingkat lokal. Artinya, persoalan rendahnya harga (pendapatan) dan kehidupan petani tidak hanya disebabkan oleh persoalan teknis semata, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan situasi dan kondisi sosial masyarakat di tingkat bawah. Iklim sosial yang dimaksud adalah adanya kenyataan bahwa

penentuan harga karet di tingkat bawah justru sering ditentukan oleh keterikatan hubungan sosial antara petani kecil, petani besar dengan pedagang karet di tingkat lokal yang menggiringnya ke sudut posisi tawar petani karet-rakyat menjadi lemah.

Petani yang menerima harga rendah umumnya petani yang memiliki lahan karet rata-rata 1 ha sehingga tempat penjualan ke pedagang pengumpul. Harga jual yang rendah dengan produksi rata-rata 302,06 kg ojol/ha/bulan dengan pendapatan Rp 1.947.712 juta/bln, sehingga kecenderungan petani tidak melakukan pemupukan. Mayoritas petani karet tidak melakukan pemupukan yang mestinya dilakukan selama tiga kali setahun. Petani yang melakukan pemupukan umumnya yang memiliki lahan yang luas > 1 ha. Secara umum petani masih belum melaksanakan pemupukan secara teratur dan sesuai anjuran akibatnya produktifitas yang diperoleh masih rendah. Namun demikian petani masih menerima pendapatan dalam memenuhi kebutuhannya yang hanya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan primer.

Masyarakat menilai program pemerintah selama ini yang berbentuk bantuan langsung tidak efektif dilaksanakan. Hal ini dikarenakan tidak dapat membangkitkan semangat mandiri masyarakat sehingga pada akhirnya terbuang sia-sia. Pembangunan berkelanjutan tidak tercapai. Masyarakat sekarang telah siap untuk mencoba program pemerintah yang bersifat pergiliran dan kemandirian. Namun demikian masyarakat mengharapkan adanya pendampingan yang dapat membantu dan mengawasi program pembangunan perkebunan.

Survey lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat sangat tertarik dengan pola penjualan secara bersama dalam bentuk kelompok, karena telah terbukti mampu meningkatkan harga penjualan. Namun permasalahan yang masih ada adalah sulitnya petani lepas dari "ikatan" dengan pedagang pengumpul, karena kondisi perekonomian yang sulit menyebabkan mereka terikat hutang. Adanya lembaga keuangan desa yang kuat dan dikelola dengan baik merupakan harapan dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan modal dan keterikatan tersebut.

Secara ringkas, ada beberapa hal yang dapat diungkapkan dari pengamatan lapangan, antara lain:

- a. Tingkat pendapatan rumah tangga tergolong rendah, kebanyakan berada dibawah Rp 1,500,000. Krisis ekonomi global cukup punya andil sebagai penyebab rendahnya pendapatan. Posisi tawar petani dalam pemasaran cukup rendah. Petani sangat terikat dengan pedagang pengumpul, yang berakibat margin pemasaran sangat tinggi. Kebiasaan petani meminjam sejumlah dana kepada pedagang pengumpul dengan nantinya dibayar saat penjualan hasil karet yang akan datang.
- b. Sejumlah petani mulai lepas dari ikatan pedagang pengumpul dengan cara membentuk kelompok usaha bersama (KUB) Pemasaran. Dalam hal ini petani secara bersama-sama langsung menjual hasil ke pabrik pengolahan. Cara ini sangat efektif untuk mengurangi margin pemasaran yang mencapai 20% yang berdampak kepada peningkatan pendapatan secara bertahap. Oleh sebab itu penguatan kelompok merupakan program yang potensial untuk meningkatkan *bargaining position* dari petani.
- c. Status pekerjaan masih banyak bekerja sebagai petani penggarap, yang diakibatkan oleh terbatasnya ketersediaan lahan dan tingginya biaya pembukaan dan penanaman lahan baru. Petani penggarap mengolah lahan pemilik tanah dengan pola bagi hasil. Jumlah petani ini cukup banyak dimana mencapai 12,5%. Tanaman pangan (terutama padi) menjadi pilihan beberapa petani untuk dijadikan sumber penghasilan sampingan namun masih secara subsisten atau hanya merupakan usaha rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- d. Kepemilikan lahan terbanyak tergolong rumah kategori sedang, Namun masih ada beberapa rumah tangga yang kepemilikan lahannya < 0,5 ha, bahkan masih ditemukan rumah tangga yang tidak memiliki lahan.
- e. Sistem bagi hasil masih ditemukan, dimana petani penggarap memperoleh $\frac{1}{2}$ dari hasil penjualan produksi perbulannya.
- f. Umur tanaman karet pada umumnya telah tua dan rusak (TTR) dan menuntut adanya persiapan kegiatan rehabilitasi (replanting),

- g. Potensi desa yang mendukung terlaksana program bantuan dengan pola pergiliran,
- h. Adanya bantuan dari pemerintah dapat membantu para petani untuk menjadi modal bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha perkebunan.
- i. Skim bantuan yang bersifat kredit dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat dari pada bantuan langsung berupa hibah yang dirasakan tidak kondusif. Potensi desa yang disurvei mendukung terlaksananya program bantuan dalam bentuk pergiliran,
- j. Beberapa bantuan berupa kredit, seperti SPP (Simpan Pinjam Perempuan), memiliki *rate of return* yang cukup tinggi. Meskipun demikian, masih dijumpai sejumlah kredit macet, terutama pada daerah yang belum memiliki lembaga keuangan desa yang baik. Adanya lembaga usaha dan keuangan desa (seperti BUMDes atau Perusdes) yang dikelola dengan baik merupakan salah satu peluang yang sangat potensial untuk dikembangkan di pedesaan, yang diharapkan dapat mengelola bantuan dan memutar perekonomian desa.
- k. Program dan Kegiatan *Micro Finance* ke desa-desa telah menjadi program strategis di Provinsi Riau melalui Program Pemberdayaan Desa, dimana disediakan Dana Usaha Desa (DUD) sebesar Rp. 250 juta hingga Rp. 500 juta setiap desa.
- l. Selain bantuan finansial, program pendampingan dan pembinaan merupakan prasyarat terhadap kesuksesan peningkatan ekonomi masyarakat desa.

5.4 Tenaga Kerja dan Mata Pencaharian

5.4.1 Tenaga Kerja

Masyarakat yang mengelola usaha kelapa sawit dan karet baik yang swadaya maupun pola PIR mempunyai tingkat pendidikan yang heterogen. Hal ini merupakan salah satu penyebab terhambatnya proses alih teknologi dan alih manajemen serta terlambat dalam menerima inovasi baru. Tingkat pendidikan masyarakat sebagai pelaku usaha dibidang perkebunan relatif



merata dengan sebaran tamat SD 37,50%, tamat SMP 29,17% dan tamat SMA 33,33%. Kondisi pendidikan kepala rumah tangga ini harus menjadi perhatian dalam penyiapan sosial masyarakat dalam kegiatan pembinaan maupun pemberdayaan lainnya.

Struktur umur petani di Rokan Hulu mayoritas berada pada usia produktif, yaitu 79,17%. Hal ini merupakan potensi yang dapat diandalkan dalam kegiatan usaha perkebunan yang membutuhkan petani yang produktif. Bila dilihat dari jam kerja petani rata-rata 6,59 jam/hari dan 6,96 jam/hari dalam rentang 3 - 14 jam/hari dan masih dibawah standar Hari Orang Kerja meskipun 29,17% bekerja di atas 8 jam/hari. Disamping itu sebanyak 33,33% bekerja di bawah 4 jam/hari, umumnya mereka adalah petani karet yang memiliki lahan kebun 1 ha dengan kegiatan penyadapan karet rata-rata 5 hari dalam seminggu. Kondisi ini menunjukkan masih banyak waktu luang yang bisa dimanfaatkan petani untuk melakukan pekerjaan lain diluar pekerjaan utama sebagai petani untuk menambah penghasilan keluarga, hal ini baru dimanfaatkan sebanyak 54,17% petani dengan pekerjaan sampingan diantaranya berdagang dan jasa.

Pembangunan selama ini cenderung menitikberatkan pembangunan dari aspek fisik dan kurang menyentuh aspek sosial ekonomi dan budaya petani untuk mendidik, memotivasi dan membina petani dalam aspek sosial dan ekonomi terkait dalam usaha menghimpun dana untuk membiayai usahataniya dalam jangka pendek dan membiayai peremajaan kebun dalam jangka panjang dikemudian hari. Petani kurang mendapatkan pembinaan dalam mengasah jiwa enterpreneur baik individu maupun kolektif karena keterbatasan petugas lapangan dalam mendampingi dan membantu petani menghadapi permasalahan di lapangan. Disisi lain peran dari petugas lapangan sangat penting untuk memotivasi petani menjalankan aktifitas ekonominya.

5.4.2 Mata Pencaharian

Pembangunan tenaga kerja sebagai bagian dari upaya peningkatan sumberdaya manusia diarahkan pada peningkatan harkat dan martabat

kemampuan manusia serta kepercayaan pada diri sendiri. Upaya ini ditempuh melalui perluasan lapangan pekerjaan dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu, serta perlindungan tenaga kerja.

Pada umumnya penduduk di daerah survey (Kecamatan Rokan IV Koto) bekerja pada sektor pertanian seperti perkebunan, kehutanan dan lain-lain. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, pekerjaan dibidang perkebunan dan kehutanan banyak dilakukan oleh masyarakat di ibu kota kecamatan seperti pada perusahaan perkebunan swasta, pengolahan kayu dan sebagainya.

Tenaga kerja yang terampil di daerah Kecamatan Rokan IV Koto belum banyak, sebab jika mereka sudah terampil cenderung akan meninggalkan tempat tinggal mereka dan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya.

Pada umumnya masyarakat desa hanya mengandalkan tenaga fisiknya dalam pekerjaan terutama jika mengolah ladang, tanpa adanya masukan input teknologi seperti pupuk dan juga kurang memanfaatkan ketentuan-ketentuan bercocok tanam yang baik. Mereka masih menggunakan teknologi yang sederhana karena lebih mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya yang besar.

Berdasarkan data yang diperoleh di wilayah studi, sektor pertanian merupakan lapangan pekerjaan utama bagi penduduk Kecamatan Rokan IV Koto (85,83 %), karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah pertanian. Di samping itu sebagian bekerja menjadi buruh perkebunan (5,41%), khususnya perkebunan karet. Selain menjadi petani dan buruh perkebunan juga ada yang bekerja sebagai pedagang (3,70 %), dan sebesar 5,06 persen bekerja disektor lain.

Dalam sektor pertanian ini yang dominan adalah subsektor perkebunan yaitu perkebunan karet, dan gambir. Pada umumnya karet ditanam setelah tanaman pada ladang dengan sistem ladang berpindah. Setelah padi ladang dipanen maka lahan langsung ditanami dengan karet atau gambir dan selanjutnya lahan tersebut ditinggalkan untuk beberapa tahun.

Selain perkebunan karet mata pencaharian utama bidang perkebunan lainnya bagi masyarakat di adalah perkebunan gambir, pinang, dan kakao. Tanaman gambir sangat cocok dengan kondisi alam di daerah ini dan sudah banyak diusahakan oleh masyarakat terutama di desa Cipang Kiri Hulu, Cipang Kiri Hilir, dan Cipang Kanan.

Pada umumnya masyarakat Rokan IV Kota kurang berminat untuk menanam padi di sawah. Hal ini tergambar dari areal persawahannya yang tidak diolah. Akibatnya banyak sawah yang ditelantarkan dan tidak diolah terutama di ditemui di Kelurahan Rokan dan Desa Cipang Kiri Hulu. Menurut pengamatan dan wawancara dengan masyarakat faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat mengolah sawah antara lain adalah: karena orientasinya masih subsistem (untuk kebutuhan sendiri), pengolahan sawah memerlukan banyak tenaga sementara jumlah tenaga kerja kurang, mahalnya harga sarana produksi dan adanya alternatif lain yang lebih mudah pekerjaannya yaitu padi ladang.

Selain dari padi sawah dan padi ladang, potensi tanaman pangan yang dapat dikembangkan adalah kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dan kadang hijau. Masyarakat di wilayah studi khususnya desa Cipangkiri Hulu, Cipang Kiri Hilir, dan Cipang kanan selama ini telah mengusahakan tanaman tersebut. Namun karena sulitnya transportasi dan sempitnya pasar menyebabkan tanaman tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri.

Dengan semakin luasnya pembukaan areal perkebunan besar baik swasta maupun pemerintah di daerah Kecamatan Rokan IV Koto ini telah mendorong masyarakat Rokan IV Koto untuk membuka lahan baru untuk usaha di bidang perkebunan. Selain karena aspek harga jual maupun dari sudut pemasaran cukup menawarkan harapan bagi masyarakat, juga karena adanya kekhawatiran tak akan dapat tanah dimasa datang.

5.5. Analisis Potensi Wilayah Survei

Hasil kajian yang terkait dengan potensi wilayah di Kabupaten Rokan Hulu yang berpotensi adalah sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Ketiga sector tersebut memegang peranan yang dominan dalam perekonomian daerah Kabupaten Rokan Hulu. Hal tersebut terbukti



dikembangkan. Artinya, apabila spesialisasi ditingkatkan pada ketiga sektor tersebut maka akan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi lagi bagi perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ada beberapa alasan mengapa empat sektor tersebut berpotensi untuk dikembangkan, anantara lain: *Pertama*, ketersediaan sumberdaya alam yang cukup, seperti lahan pertanian yang cocok, pertambangan dan penggalian; *Kedua*, jumlah warga transmigran yang cukup banyak dan mempunyai skill yang cukup merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perkebunan maupun tanaman pangan dan hortikultura.; *Ketiga*, dengan luas lahan perkebunan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu menyebabkan berkembangnya industry pengolahan dari hasil perkebunan tersebut; dan *keempat*, perkembangan sector perkebunan telah meningkatkan jumlah uang beredar di daerah, sehingga mobilitas barang meningkat dan mengundang tumbuhnya sector jasa.

5.5.1 Analisis Keunggulan Komparatif

Analisis struktur ekonomi daerah Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa sektor pertanian berpotensi untuk dikembangkan dan subsektor perkebunan memegang peranan yang dominan. Untuk melihat komoditas mana yang berpotensi untuk dikembangkan maka dilakukan juga analisis Location Quotient yang pendekatannya melalui luas lahan yang digunakan.

Hasil analisis LQ tentang luas lahan perkebunan setiap kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu disajikan pada Tabel 5.6. Dari tabel tersebut untuk daerah survey yakni Kecamatan Rokan IV Koto nilai LQ yang besar dari 1 adalah untuk komoditi karet, dan gambir. Berarti kedua jenis komoditi tersebut mempunyai peluang untuk mempunyai keunggulan komparatif dari segi luas lahan. Keunggulan komparatif ini lebih didukung oleh kondisi alam yang sangat cocok dengan tanaman karet dan gambir, hal tersebut disebabkan daerah Rokan IV Koto merupakan wilayah yang berada di bukit barisan dengan tingkat kemiringannya yang lebih curam dibandingkan dengan wilayah yang lain. Jadi kedua komoditi ini sangat cocok diusahakan oleh masyarakat wilayah survey.

Tabel 5.6. Analisis LQ Berdasarkan Luas Lahan Perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007

No	Kecamatan	Karet	Kelapa Sawit	Gambir	Kelapa Dalam	Kakao
1	Rokan IV Koto	2.69	0.62	14.19	0.76	0.50
2	Tandun	0.27	1.15	0.00	0.52	0.96
3	Kabun	0.42	1.13	0.00	0.05	0.00
4	Ujung Batu	0.23	1.12	0.00	0.71	22.42
5	Rambah Samo	1.29	0.95	0.00	1.06	0.02
6	Rambah	4.44	0.30	0.00	4.65	0.87
7	Rambah Hilir	3.98	0.41	0.00	2.01	0.77
8	Bangun Purba	1.58	0.89	0.00	0.39	0.08
9	Tambusai	0.35	1.13	0.00	1.03	0.21
10	Tambusai Utara	1.22	0.96	0.00	1.33	0.00
11	Kepenuhan	0.63	1.08	0.00	0.81	0.89
12	Kunto Darussalam	0.01	1.20	0.00	0.77	0.00
13	Pagaran Tapah D	0.17	1.17	0.00	0.78	0.00
14	Bonai Darussalam	0.46	1.01	0.00	22.40	1.84

Ditinjau dari segi sosiologis hal ini dimungkinkan karena petani telah menanam tanaman karet secara turun temurun dan ditambah dengan kondisi alam dan jenis tanah yang mendukung, sehingga petani di Kecamatan Rokan IV Koto banyak menanam komoditi tersebut. Sedangkan untuk tanaman perkebunan kelapa sawit nilai LQ nya kecil sekali. Namun tidak berarti bahwa sawit tidak cocok atau tidak mempunyai prospek yang baik. Tanaman kelapa sawit belum ditanam secara luas di daerah ini karena belum tersedianya sarana jalan untuk mengangkut hasil produksi (TBS) ke tempat pengolahan. Dari hasil wawancara ternyata minat petani untuk bertanam sawit sangat tinggi, tentu saja bila sarana jalan telah ada. Bahkan dari pengamatan dilapangan ada masyarakat yang nekat bertanam sawit walaupun pemasaran tidak bisa dilakukan.

5.5.2 Analisis Perdagangan antar Daerah

Perdagangan timbul karena adanya perbedaan harga antara dua lokal atau lebih dan adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri oleh konsumen atau tidak efisien bila diproduksi sendiri sehingga akan lebih baik

Tabel 5.6. Analisis LQ Berdasarkan Luas Lahan Perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007

No	Kecamatan	Karet	Kelapa Sawit	Gambir	Kelapa Dalam	Kakao
1	Rokan IV Koto	2.69	0.62	14.19	0.76	0.50
2	Tandun	0.27	1.15	0.00	0.52	0.96
3	Kabun	0.42	1.13	0.00	0.05	0.00
4	Ujung Batu	0.23	1.12	0.00	0.71	22.42
5	Rambah Samo	1.29	0.95	0.00	1.06	0.02
6	Rambah	4.44	0.30	0.00	4.65	0.87
7	Rambah Hilir	3.98	0.41	0.00	2.01	0.77
8	Bangun Purba	1.58	0.89	0.00	0.39	0.08
9	Tambusai	0.35	1.13	0.00	1.03	0.21
10	Tambusai Utara	1.22	0.96	0.00	1.33	0.00
11	Kepenuhan	0.63	1.08	0.00	0.81	0.89
12	Kunto Darussalam	0.01	1.20	0.00	0.77	0.00
13	Pagaran Tapah D	0.17	1.17	0.00	0.78	0.00
14	Bonai Darussalam	0.46	1.01	0.00	22.40	1.84

Ditinjau dari segi sosiologis hal ini dimungkinkan karena petani telah menanam tanaman karet secara turun temurun dan ditambah dengan kondisi alam dan jenis tanah yang mendukung, sehingga petani di Kecamatan Rokan IV Koto banyak menanam komoditi tersebut. Sedangkan untuk tanaman perkebunan kelapa sawit nilai LQ nya kecil sekali. Namun tidak berarti bahwa sawit tidak cocok atau tidak mempunyai prospek yang baik. Tanaman kelapa sawit belum ditanam secara luas di daerah ini karena belum tersedianya sarana jalan untuk mengangkut hasil produksi (TBS) ke tempat pengolahan. Dari hasil wawancara ternyata minat petani untuk bertanam sawit sangat tinggi, tentu saja bila sarana jalan telah ada. Bahkan dari pengamatan dilapangan ada masyarakat yang nekat bertanam sawit walaupun pemasaran tidak bisa dilakukan.

5.5.2 Analisis Perdagangan antar Daerah

Perdagangan timbul karena adanya perbedaan harga antara dua lokal atau lebih dan adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri oleh konsumen atau tidak efisien bila diproduksi sendiri sehingga akan lebih baik

dilakukan pertukaran (perdagangan) antara satu dengan yang lain. Berdasarkan potensi yang ada di daerah Rokan IV Koto maka sektor perkebunan merupakan komoditas utama yang diperdagangkan antar daerah. Dari data yang ada, komoditas karet merupakan komoditas utama yang diperdagangkan. Menyusul kemudian adalah gambir, kelapa sawit, kelapa dalam dan kakao. Hasil perkebunan ini di jual petani kepada toke-toke yang ada di desa setempat, oleh toke kemudian dijual ke Ujung Batu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Barang-barang yang masuk ke daerah Rokan IV Koto adalah barang-barang primer (kebutuhan sehari-hari) dan barang sekunder serta tersier. Perdagangan antar desa dan antar daerah terjadi terutama pada hari-hari pekan. Barang-barang perdagangan yang masuk ke daerah ini pada umumnya berasal dari kota Ujung Batu. Selain itu sebagian juga ada yang datang dari Bangkinang dan Pekanbaru. Umumnya barang yang datang dari lokasi yang jauh adalah barang-barang yang ringan dan bernilai tinggi. Hal ini karena mahalnya biaya transportasi melalui sungai. Daerah lain sebagai pemasok barang perdagangan adalah dari daerah Pasaman Timur, Sumatera Barat yang masuk melalui perbatasan di dusun Kersik Putih, desa Cipang Kanan. Dengan telah dibukanya jalan penghubung antara Kersik Putih dengan desa lain di Kecamatan Rokan IV Koto, yang dapat dilalui dengan mobil pada musim kering, maka dimasa datang diperkirakan intensitas perdagangan akan meningkat tajam antara kedua daerah. Kecenderungan ini sudah terlihat sejak jalan dari Pasaman Timur ke desa perbatasan (Rumbai) mulai diaspal oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Selain itu arus barang dari Sumatera Barat juga masuk dari Sumatera Barat melalui dusun Pintu Kuari, desa Cipang Kiri Hulu dengan menggunakan sarana pengangkutan kuda beban.

Pada saat ini yang menjadi permasalahan utama bagi masyarakat desa adalah transportasi. Ketiga desa yang disurvei mengandalkan sungai sebagai sarana transportasi dengan biaya tinggi dan memakan waktu yang lama. Jika dibangun jalan darat yang menghubungkan ketiga desa ini dengan pusat kecamatan dan ke pusat pertumbuhan ekonomi di Ujung Batu, maka ke

tiga desa ini akan berkembang dengan cepat. Disamping itu pengembangan sumberdaya manusia (SDM) melalui pendidikan dasar dan lanjutan akan lebih maju.

Karena kondisi daerah yang terisolir dan sarana transportasi yang sangat tidak memadai ini maka akibatnya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekunder sangat mahal dan kadang-kadang juga sulit untuk didapatkan, terutama bila air sungai dangkal pada musim kering. Sebagai gambaran dari hasil survey harga beberapa kebutuhan pokok di daerah studi 40 % lebih mahal dibandingkan dengan harga daerah Rokan (ibukota kecamatan). Bila harga ini dibandingkan dengan daerah Ujung Batu maka selisih harga akan jauh lebih tinggi.

5.5.3. Sektor dan Lokasi yang Mempunyai Daya Tarik dan Peluang Investasi

Sesuai dengan potensi daerah Kecamatan Rokan IV Koto dan kondisi geografi daerah maka ada beberapa sektor yang mempunyai peluang untuk pengembangan lebih lanjut melalui kerjasama dengan pihak swasta. Sektor-sektor tersebut adalah pertanian dan agrowisata.

Salah satu sektor yang potensial adalah sektor pertanian terutama subsektor perkebunan. Keadaan topografi tanah yang sedikit bergelombang menyebabkan kurang cocok untuk tanaman pangan dalam skala luas. Tanaman perkebunan yang cocok untuk dikembangkan didaerah ini adalah karet, kelapa sawit, gambir dan coklat. Dari hasil observasi lapangan, tanaman karet sudah dikenal dan ditanam secara luas dan merata hampir disetiap desa dan setiap petani. Tetapi untuk peningkatan produktivitas perlu adanya peningkatan mutu dan input teknologi. Selain karet, tanaman kelapa sawit sangat diminati oleh masyarakat. Lebih 90% penduduk dari sampel yang diwawancarai menginginkan dibukanya perkebunan kelapa sawit bila pemerintah bersedia membantu modal dan pembinaan. Bila pemerintah tidak mau membantu maka pilihan kedua adalah karet dan gambir. Tanaman gambir akhir-akhir ini makin diminati karena harganya yang baik dan

budidayanya yang relatif mudah. Dari hasil perhitungan ternyata gambir memberikan tingkat keuntungan yang sama dengan kelapa sawit.

Sektor menarik lainnya adalah agrowisata yang terkait langsung dengan subsektor perkebunan. Bila perkebunan berhasil dengan baik dan ditunjang dengan keadaan alam Rokan IV Koto yang bergelombang dengan sungai-sungai kecil yang banyak, maka pengembangan agrowisata sangat potensial dimasa depan. Didaerah-daerah ini juga mempunyai hutan lindung yang luas (57.000 Ha) yang bisa menjadi daya tarik untuk agrowisata. Selain agrowisata, wisata air juga bisa dikembangkan karena terdapatnya sungai-sungai besar dan kecil. Untuk pengembangan agrowisata ini perlu pelestarian lingkungan untuk mempertahankan flora dan fauna. Secara umum daerah ini cukup menarik bagi swasta untuk dikembangkan karena mempunyai potensi yang cukup cerah. Dengan topografi yang bergelombang dan banyaknya sungai-sungai kecil dan besar akan sangat menarik bagi usaha pariwisata.

5.5.4 Animo Masyarakat terhadap Program Permukiman

Dari tiga desa sampel yang disurvei (Cipang Kiri Hilir, Cipang Kiri Hulu dan Cipang Kanan) ternyata animo masyarakat terhadap program transmigrasi sangat tinggi. Keinginan ini timbul karena mereka (masyarakat) melihat dari daerah tetangga kemajuan ekonomi pedesaan yang berkembang sebagai akibat dari program transmigrasi. Ada suatu pandangan didalam masyarakat bahwa program transmigrasi akan menyebabkan terbangunnya infrastruktur dan sector pertanian. Hal tersebut mungkin terkait dengan adanya kemudahan untuk mendapatkan Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Mayoritas penduduk (94%) menginginkan adanya program transmigrasi dengan pola PIR Trans, bila proyek tersebut untuk masyarakat setempat. Hanya 6% dari mereka yang menolak transmigrasi.

Bila sekiranya pemerintah ingin mengambil lahan mereka untuk keperluan pembangunan maka mereka menginginkan adanya jaminan lahan untuk generasi mendatang karena menyangkut dengan lahan ulayat yang dialihkan status hukumnya. Dari seluruh responden sebanyak 67% menginginkan ganti rugi terhadap tanah mereka yang diambil dengan kebun. Sebanyak 21% menginginkan ganti rugi dengan uang.

5.6 Komoditas Unggulan yang Disarankan

5.6.1 Tanaman Pangan

Hasil pengamatan di wilayah studi menunjukkan hampir setiap kepala keluarga melakukan usahatani tanaman padi. Di Desa Cipang Kiri Hulu sebagian besar keluarga tani melakukan tanaman padi sawah dan bisa dilakukan panen 2 kali setahun. Kondisi ini ditunjang oleh sumberdaya alam yang ada dimana sumber air irigasi cukup tersedia. Sedangkan di kedua desa lainnya yakni, Desa Cipang Kiri Hilir dan desa Cipang Kanan usahatani tanaman pangan yang mereka lakukan adalah menanam padi ladang dengan 1 kali panen dalam 1 tahun. Walaupun usahatani tanaman padi ini tidak menguntungkan secara ekonomi, namun demikian pekerjaan ini tetap mereka lakukan karena telah menjadi tradisi mereka.

Melihat kondisi topografi wilayah dan ketersediaan air, maka komoditas tanaman pangan yang cocok dikembangkan di wilayah studi adalah tanaman padi ladang, karena kondisi wilayah ini tidak memungkinkan membuat saluran irigasi karena biayanya terlalu besar kecuali untuk desa Cipang Kiri Hulu.

Usaha peningkatan pendapatan petani melalui usahatani padi ladang perlu dilakukan penyuluhan dan demonstrasi dengan membuat pilot proyek di lokasi calon transmigrasi. Penyuluhan dan demonstrasi pilot tersebut meliputi; memperkenalkan bibit unggul padi ladang, cara pengolahan tanah yang lebih baik, teknik penanaman dengan penyulaman, pemupukan, pemberantasan gulma, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, teknik penanaman dan pasca panen. Diharapkan dengan cara teknik budidaya yang baik akan tersosialisasikan kepada seluruh masyarakat wilayah Kecamatan Rokan IV Koto.

5.6.2. Tanaman Perkebunan

Hasil survey di wilayah studi dijumpai enam tanaman perkebunan yang dibudidayakan dan dapat membantu perekonomian masyarakat. Keenam tanaman tersebut adalah karet, gambir, kopi, pinang, nilam, dan kayu manis. Tanaman karet merupakan tanaman yang paling lama mereka kenal dan telah berumur puluhan tahun serta tanaman yang paling luas dibandingkan dengan tanaman lain.

Tanaman karet telah memasyarakat dengan petani di wilayah studi. Karena itu untuk budidaya, panen dan pascapanen karet tidak menjadi masalah. Tenaga kerja untuk panen karet tidak terlalu banyak yakni pada dua hektar kebun karet hanya membutuhkan dua orang tenaga kerja dan hal ini bisa dikerjakan oleh kepala keluarga bersama anggota keluarga.

Ditinjau dari segi pemasaran, harga karet tidaklah terlalu berfluktuasi tajam seperti gambir dan nilam, harga karet lebih stabil. Kestabilan harga ini sangat menentukan usahatani perkebunan bagi petani desa.

Dilihat dari segi transportasi pemasaran, di wilayah studi sangat bergantung pada transportasi sungai, yang dapat dilalui oleh sampan dan speed boat. Sungai rokan yang dilalui tersebut tergolong dangkal, sehingga untuk mencapai lokasi dari ibukota kecamatan yaitu kurang lebih lima jam. Hasil panen yang mudah untuk dibawa ke ibukota kecamatan adalah karet, karena bisa dengan mudah dialirkan mengikuti arus sungai. Dengan demikian biaya transportasi tidak begitu besar bila dibandingkan dengan hasil panen lainnya seperti sawit, gambir dan lain-lain.

Dari segi investasi atau permodalan untuk pengembangan kebun karet tidak sebesar gambir dan kelapa sawit. Ditambah lagi dari segi pemeliharaan kebun karet lebih sederhana dan tidak memerlukan biaya yang besar.

Berdasarkan keterangan di atas maka komoditas unggulan pertama yang cocok untuk dikembangkan pada wilayah studi adalah karet. Hal tersebut juga didukung oleh sebagian animo masyarakat, kesesuaian lahan di wilayah studi, dan keunggulan komparatif dari segi sumberdaya alam yang tersedia dan tenaga kerja yang ada.

Tanam perkebunan kedua yang diunggulkan adalah tanaman kelapa sawit. Walaupun tanaman ini belum diusahakan secara luas di daerah ini karena masih sulitnya sarana transportasi untuk pemasaran dan juga memerlukan biaya investasi yang cukup besar, namun masyarakat sangat berminat untuk menanam dan mengusahakan tanaman kelapa sawit. Hal ini disebabkan informasi yang diterima petani cukup memberikan pengharapan bahwa kelapa sawit mampu meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat seperti yang mereka saksikan di daerah-daerah

lain. Seperti diuraikan sebelumnya bahwa dari hasil survey dan wawancara dengan masyarakat ternyata lebih dari 94 % masyarakat ingin untuk mengusahakan sawit. Untuk itu mereka mengharapkan sekali bantuan pemerintah untuk membantu dalam menyediakan sarana transportasi dan juga pabrik pengolahan CPO.

Melihat luas lahan yang tersedia sangat memungkinkan untuk menanam tanaman kelapa sawit di daerah ini. Sementara pabrik belum bisa dibangun dalam waktu cepat alternatif lain adalah membawa TBS ke pabrik pengolahan terdekat di daerah Tandun. Dan ini memungkinkan karena jarak antara lokasi dengan daerah Tandun hanya lebih kurang 65 Km atau dengan waktu tempuh lebih kurang selama 1-2 jam. Namun ini hanya bisa kalau sarana jalan antara lokasi dengan daerah Ujung Batu telah ada dan kapasitas olah di kebun pabrik kelapa sawit (PKS) Tandun belum penuh. Kemungkinan lain adalah membangun pabrik mini skala kecil yang membutuhkan luas kebun hanya sekitar 2000 ha dengan kapasitas olah sekitar 15.000 sampai 20.000 ton per jam.

Komoditi ketiga yang diunggulkan adalah gambir. Gambir merupakan tanaman terluas setelah karet, tetapi tidak merata Desa Cipang Kiri Hulu merupakan areal terluas untuk tanaman gambir yakni 353 Ha, di Cipang Kiri Hilir 31 Ha, dan Cipang Kanan seluas 100 Ha. Perkembangan gambir di Desa Cipang Kiri Hulu, Cipang Kiri Hilir dan Cipang Kanan dalam waktu 2 tahun terakhir ini cukup baik. Dengan demikian masyarakat di ketiga desa tersebut belum berpengalaman betul atau belum memasyarakat. Untuk itu perlu ada suatu penyuluhan dan bimbingan terutama dalam bentuk budidaya tanaman dan pengadaan bibit unggul.

5.6.3 Prasarana dan Sarana yang Dibutuhkan

Sarana transportasi di daerah ini sebagian besar masih tergantung pada sungai. Pada saat sekarang ini daerah yang terbuka yang dapat dihubungi dengan jalan darat dari Ujung Batu dan Muara Mahat hanyalah Rokan, ibukota kecamatan Rokan IV Koto. Ujung Batu ke Rokan dapat

dilayani oleh bus ini setiap hari. Desa-desanya lainnya masih terisolir dan hanya dapat dihubungi dengan transportasi melalui sungai dan jalan setapak.

Transportasi melalui sungai ini dilayani oleh boat dan sampan dan ini hanya lancar pada musim hujan, sedangkan pada musim kering sungai sulit dilalui karena air menjadi dangkal sehingga memerlukan waktu yang lama. Bila air dangkal maka waktu tempuh menjadi relatif sama dengan jalan kaki sehingga pada musim kering banyak masyarakat yang berjalan kaki dari pada naik sampan.

Selain jalan sungai dan jalan setapak sarana transportasi lainnya adalah kuda beban yang digunakan terutama pada daerah berbukit seperti dari daerah Rao Pasaman Timur ke Ciang Kiri Hulu melalui dusun Pintu Kuari. Bahkan sebagian masyarakat dan pedagang juga memakai tenaga pikul manusia untuk mengangkut barang dagangan terutama untuk mengangkat barang-barang yang diperdagangkan di pedesaan, atau sampai ke pinggir sungai dan selanjutnya diangkut dengan sampan atau boat air.

Kondisi jalan di tiga desa sampel yang disurvei sangat tidak memadai. Di tiga desa ini satu-satunya daerah yang bisa dihubungkan dengan mobil adalah desa Tibawan dengan desa Kubang Buaya sejauh 7 Km. Dari desa Kubang Buaya ini bisa tembus ke desa Kersik Putih, desa perbatasan Riau Sumatera Barat. Karena jalan ini adalah jalan tanah maka kondisi jalan ini sangat tergantung pula dengan cuaca. Bila musim hujan jalan ini tidak dapat dilalui sama sekali. Jalan tanah inipun baru dibuka beberapa bulan terakhir dengan bantuan pemerintah. Padahal di daerah Sumatera Barat desa perbatasan ini akan dihubungkan dengan jalan aspal ke daerah-daerah lain di Sumatera Barat.

Pada saat ini pemerintah kecamatan akan membuka jalan penghubung antar desa untuk memutus keterisoliran desa-desa tersebut. Dana untuk membangun jalan ini berasal dari dana APBD. Namun sesuai dengan dana yang tersedia jalan yang akan dibangun ini hanyalah jalan tanah tanpa pengerasan. Jalan ini akan memegang peranan yang sangat penting karena akan menghubungkan ibukota kecamatan Rokan dengan tiga desa terisolir tersebut dan terus ke daerah Sumatera Barat. Bila jalan ini terealisasi maka

pusat pertumbuhan Ujung Batu akan bisa terhubung dengan Rokan hingga ke tiga desa-desa terisolir, Cipang Kiri Hilir Cipang Kiri Hulu dan Cipang Kanan terus ke daerah perbatasan Sumatera Barat. Diperkirakan akan terbentuk pusat pertumbuhan baru di hulu Sungai Rokan karena desa-desa terisolir di Rokan IV Koto akan terbuka dan akan tertarik oleh pusat pertumbuhan di daerah Rao, Pasaman Timur. Diperkirakan dari Ujung Batu ke Rao akan dapat ditempuh dalam tempo 1-2 jam saja.

5.7 Prioritas Program

Berdasarkan pada identifikasi dan analisis ekonomi, sosial, fisik dan geografi daerah maka program yang seharusnya diprioritaskan adalah:

Prioritas pertama, penegasan zonasi tataguna lahan dan status lahan. Hal ini dimaksud untuk menghindari konflik antar berbagai kepentingan dan untuk melindungi kepentingan rakyat kecil. Bila jalan telah dibangun, maka daerah semakin terbuka sehingga timbulnya konflik dan pengrusakan lingkungan akan semakin besar. Dengan rendahnya pengawasan dan penegakan hukum pada saat ini, maka diharapkan pada masyarakat untuk mengawasi dan menjaga daerah sendiri. Hal ini hanya mungkin terjadi bila pemantapan zonasi dan status lahan telah ada. Untuk itu perlu segera dilakukan pengurusan alih status lahan dari hutan konversi kepada Pemerintah Daerah Propinsi (Gubernur) dan Kanwil Kehutanan serta Perkebunan sehingga masyarakat mendapatkan kepastian.

Prioritas kedua, pembukaan isolasi daerah melalui pembangunan sarana jalan. Pembangunan ini sangat krusial untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Prioritas ketiga, sosialisasi dan pembentukan wadah kemasyarakatan untuk membangun perekonomian masyarakat. Wadah ini dapat berupa koperasi atau bentuk lain yang disepakati. Sedangkan pembangunan perekonomian masyarakat dapat berupa pembangunan perekonomian dan pertanian lainnya yang dapat dikaitkan dengan program transmigrasi.

Semua prioritas program ini tidak harus berurutan dalam pelaksanaannya, tetapi dapat berjalan secara bersamaan (simultan).